



MINGGU II | JULI 2023

• TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 •

info indonesia

Road to
Election
2024



3 CAPRES PILIHAN RAKYAT

HARUMKAN
SUMSEL
DI KANCAH
NASIONAL

KOLABORASIKAN
RITEL MODERN
DAN UMKM

MENEMBUS
DOMINASI
LELAKI POLITISI

SATU-SATUNYA
PERAIH SATYALANCANA
PEMBANGUNAN

Pemilu 2024, Wujudkan Pemilu Bermartabat

Meski belum kentara, nuansa pemilu sudah menyelinap masuk ke sendi kehidupan masyarakat. Tebaran flyer (poster online) telah masuk ke tiap beranda pengguna sosial media di zaman serba digital ini, kontennya pun berupa muatan profil calon kontestan, pengalaman, serta rekam jejak pengabdian atau prestasi calon kontestan dan bahkan ada pula yang sudah turun bersua masyarakat secara langsung dalam upaya mendulang suara calon pemilih yang sedang diincar oleh si kontestan untuk menjadi jawara rakyat.

Tahun 2024 adalah catatan sejarah baru yang sedang dirancang bangun oleh bangsa Indonesia yaitu untuk pertama kali menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Gegap gempita itu disambut meriah oleh rakyat Indonesia, sejatinya pemilu sebagai medium konsolidasi politik bangsa menuju kepada hakikatnya demokrasi sebagai kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat, juga sebagai momentum rakyat menentukan pilihan terhadap pembaharuan pejabat publiknya yang akan menentukan arah kemajuan bangsa sebagaimana janji kemerdekaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepak terjang sejarahnya, Indonesia baru melaksanakan pemilu pertamanya pada Tahun 1955, Tahun 1971, 1982, 1989, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan Tahun 2019. Pengalaman telah mengantarkan



Oleh Musriadi, S.Sos.
Penulis adalah Alumni Fakultas Administrasi Negara Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli.

Indonesia kepada gerbang yang lebih sempurna dalam berdemokrasi, bagaimana pemilu era orde lama, orde baru dan reformasi telah memberikan kecap rasa dalam pemilihan, dan Tahun 2024 sebagai magnum opus-nya pemilu yang dilaksanakan oleh anak bangsa Indonesia.

Pemilu Bermartabat

Ya, perjalanan panjang bangsa ini selalu memuat catatan kronis dalam tiap perjalanan pemilu, politik yang mendominasi kompetisi sehingga seringnya yang memiliki modal besar /kapital yang menduduki jabatan amanat rakyat. Politik seperti itu telah menjadi ancaman yang sangat disadari oleh partai politik, penyelenggara dan pengawas (KPU dan Bawaslu) dan masyarakat itu sendiri. Betapa tidak, perilaku tersebut telah menuntun jalan kepada para politisi untuk terus mencuri atau menggarong uang negara (upaya balik modal dan mencari keuntungan berlebih), perilaku itu enggan untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan kepada kemajuan bangsa.

Selain itu, kenangan pahit dalam konsolidasi kebangsaan telah tercoreng, Pemilu 2019 silam, narasi perpecahan sangat kental mengisi hari-hari panjang yang telah mengotori dan mencemari kemajemukan bangsa Indonesia. Meski setelah itu beres-nya dua kandidat yang bertarung,

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, narasi politik perpecahan telah merekam segalanya, rekonsiliasi politik tersebut tidak berjalan mulus dalam konsolidasi kebangsaan.

Optimisme mewujudkan pemilu bermartabat adalah kehendak nurani yang diinginkan oleh semua elemen, namun keinginan tanpa adanya keterlibatan aktif didalamnya akan berjalan nihil. Butuh sinergitas mulai dari penyelenggara, pengawas, partai politik, pemilih, pemerintah, pegiat pemilu, media dan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), martabat memiliki arti tingkat harkat kemanusiaan; harga diri. Manusia adalah sesempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut Emmanuel Kant (1804), martabat merupakan nilai yang melekat dalam diri manusia yang mendasari penghormatan terhadap manusia itu sendiri.

Dalam konteks pemilihan, pemilu bermartabat dapat terlaksana dengan sempurna ketika ekosistem di dalamnya



Optimisme mewujudkan pemilu bermartabat adalah kehendak nurani yang diinginkan oleh semua elemen, namun keinginan tanpa adanya keterlibatan aktif didalamnya akan berjalan nihil.

seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, kawula pers, serta masyarakat sebagai pemilih mendapatkan edukasi politik yang memadai dan matang dalam menentukan sikapnya (memilih) calon wakilnya yang mampu mengemban arah kemajuan dan kesejahteraan. Elemen yang ada dalam ekosistem tersebut harus mengedepankan komitmen bersama, kesungguhan untuk bersinergi demi kematangan dan kedewasaan kita

dalam politik dan demokrasi.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Bab II pasal 3 yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien dalam upaya meminimalisir terjadinya perilaku malpraktek pemilu, cacat pemilu, manipulasi dan kecurangan pemilu.

Pemilu bermartabat merupakan akumulasi dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ditandai dengan lahirnya kontestasi yang sehat tanpa persaingan politik 'hitam' yang hanya mementingkan kelompok tertentu. Dan rakyat harus memahami dan menyadari posisinya sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat dalam menentukan dan meregenerasi calon pejabat publiknya. Dengan begitu, rakyat mengetahui bahwa ia memiliki harga diri, kesempatan dan hak untuk menentukan nasibnya di masa mendatang sehingga tidak membiarkan suaranya dijual murah kepada para politisi oportunist yang cenderung koruptif.

Rakyat selaku pemilih/ pemegang hak suara memiliki peran besar dalam merubah wajah demokrasi kita, dituntut untuk lebih kritis dan selektif dalam menentukan calon wakilnya. Meski tiap agenda pemilu, rakyat selalu dihujani dengan tontonan visual pencitraan, kita harus menetapkan patron pilihan calon wakil rakyat yang lebih substantif, atau merakyat. Dalam konteks Islam, memilih pemimpin itu berdasar pada leadership prophetic yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dicontohkan oleh nabi dan rasul dengan mengikuti petunjuk Allah melalui pedoman hidup Al Quran.

Optimisme pemilu bermartabat harus selalu digaungkan, sebagai ikhtiar melahirkan para pemimpin yang peduli terhadap amanah rakyatnya. Pemilu 2024 menjadi momentum menentukan anggota legislatif berbagai tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan pemilihan senator DPD RI, serta eksekutif; Bupati, Gubernur dan Presiden RI.

Momentum baik itu harus disambut baik, dengan cara yang baik dan tentunya harapan baik pada Pemilu 2024 nanti melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik pula. Semoga.●

Bawaslu Usul Pilkada Serentak 2024 Ditunda

KPU MALAH MINTA DIPERCEPAT

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengaku belum tahu mengenai usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Bagja menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan terdapat potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Maksud dia itu apa? Aku tidak tahu," kata Hasyim usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Hasyim juga mengaku belum tahu dasar yang dijadikan Bawaslu dalam memberikan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hasyim justru menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan daripada ditunda.

"Kalau kami inginnya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September," kata Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rah-

mat Bagja, mengatakan opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.

Bagja mencontohkan, apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan

bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Sebelumnya, misalnya, Pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

"Kalau Pilkada Serentak 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," sambungnya.

Bagja memaparkan sejumlah potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Bagja, potensi permasalahan itu muncul dari tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Pada aspek penyelenggara pemilu, beberapa potensi permasalahan meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Hal lainnya yakni sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu

(perbawaslu) yang belum optimal.

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja, sampai marah-marah," kata Bagja. "Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya. Misalnya, kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B. Itu juga bisa menimbulkan masalah," imbuhnya.

Bagja menambahkan, permasalahan kedua berasal dari aspek peserta pemilu, seperti masih maraknya politik uang serta transparansi pelaporan dana kampanye dan netralitas aparat sipil negara (ASN) yang belum optimal.

Selain itu, ada pula persoalan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.

Bagja menuturkan potensi permasalahan ketiga dari aspek pemilih meliputi adanya pemilih yang kesulitan dalam menggunakan hak pilih, menghadapi ancaman dan gangguan terkait kebebasan dalam memilih, serta penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

"Kita perlu melakukan antisipasi," pungkasnya. ●



Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengusulkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Bagja mengatakan opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.

Bagja mencontohkan, apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan

bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Sebelumnya, misalnya, Pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

"Kalau Pilkada Serentak 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," sambungnya.

Bagja memaparkan sejumlah potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Bagja, potensi permasalahan itu muncul dari tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Pada aspek penyelenggara pemilu, beberapa potensi permasalahan meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Hal lainnya yakni sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (perbawaslu) yang belum optimal.

Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengusulkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Bagja mengatakan opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.

Bagja mencontohkan, apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah,

polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Sebelumnya, misalnya, Pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

"Kalau Pilkada Serentak 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," sambungnya.

Bagja memaparkan sejumlah potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Bagja, potensi permasalahan itu muncul dari tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Pada aspek penyelenggara pemilu, beberapa potensi permasalahan meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Hal lainnya yakni sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (perbawaslu) yang belum optimal. ●

Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024, Junimart Girsang: SEMOGA TIDAK ADA KORBAN JIWA LAGI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan penambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 berjalan dengan baik dan tidak menelan korban jiwa seperti pada Pemilu 2019.



Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui penambahan anggaran Rp7,86 triliun kepada KPU dan sebesar Rp6,06 triliun kepada Bawaslu RI untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/9/2022).

“Penambahan anggaran disetujui dengan tujuan peristiwa miris pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi, jangan ada korban jiwa lagi, apalagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan,” jelas Junimart saat ditemui usai rapat.

Menurut Junimart, anggaran Pemilu yang minimalis sangat berpengaruh meningkatkan risiko pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak melaksanakan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif, serta dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

Kenaikan anggaran diharapkan menutup risiko petugas pemilu jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan. Pada Pemilu 2019 lalu, diketahui ada 894 petugas Pemilu meninggal dunia dan 5.175

petugas Pemilu mengalami sakit.

“KPU dan Bawaslu inikan bekerja berbasis anggaran, jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, maka kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat berisiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita,” ucap politisi PDI-Perjuangan ini.

Tragedi Gugurnya Ratusan Petugas KPPS

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, peristiwa ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat Pemilu 2019 berpotensi terulang saat Pemilu 2024. Sebab, regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilu masih sama.

“Dengan undang-undang yang sama, maka beban kerja petugas KPPS sebagai indikator kelelahan yang menimbulkan kematian dan sakitnya penyelenggara pemilu mungkin masih akan terjadi,” kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah saat konferensi pers daring terkait ‘Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif HAM’, Kamis (10/11/2022).

Sebagai informasi, Pemilu 2019 dan

Pemilu 2024 sama-sama mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat Pemilu 2019 diketahui ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kelelahan karena beban kerja tinggi. Terdapat pula 1.000 lebih petugas yang jatuh sakit.

Hairansyah mengatakan, ihwal meninggalnya petugas KPPS dalam jumlah masif ini menjadi perhatian utama Komnas HAM. Dia mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk mencegah peristiwa itu terjadi kembali saat Pemilu 2024.

“Makanya dari sekarang kami mendorong agar ada upaya perbaikan regulasi maupun teknis agar peristiwa sama tidak berulang kembali,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika peristiwa kematian massal petugas KPPS benar terjadi kembali saat Pemilu 2024, hal itu terjadi karena kelalaian penyelenggara pemilu. Sebab, penyelenggara pemilu tidak melakukan perbaikan regulasi teknis, menyediakan fasilitas dan anggaran, serta menyiapkan langkah mitigasi.

“Sehingga akhirnya Komnas HAM, bisa mengatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam Pemilu 2024,” ujar Koordinator

Subkomisi Penegakan HAM pada Komnas HAM itu.

Untuk mencegah peristiwa pilu itu terjadi kembali, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada KPU. Pertama, penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan tugas-tugas penyelenggara. Dengan begitu, beban kerja petugas KPPS bisa berkurang.

Kedua, perbaiki proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu agar tidak ada lagi kasus surat suara tertukar maupun logistik terlambat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan petugas KPPS.

“Temuan kami saat Pemilu 2019, keterlambatan logistik membuat petugas KPPS harus menunggu, bahkan sampai pagi. Padahal mereka harus mengurus pencoblosan, perhitungan, dan rekapitulasi suara di pagi hari. Kekuatan fisik mereka terkuras,” kata Hariansyah.

Ketiga, KPU perlu membuat aturan panduan penyelenggaraan terkait aspek kesehatan petugas, terutama saat hari pencoblosan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan petugas KPPS memperhatikan kesehatan mereka sedari awal.

Hairansyah mengatakan, aturan panduan itu harus memuat soal ketentuan jam kerja. Harus ada pula ketentuan terkait asupan petugas KPPS. Misalnya acuan berapa gelas kopi yang bisa mereka konsumsi saat hari pencoblosan. Termasuk pula batasan konsumsi rokok. Selain itu, perlu pula rekomendasi jenis vitamin yang bisa mereka konsumsi.

Keempat, KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan saat hari pencoblosan. Sebelumnya, KPU telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mencegah gugurnya petugas KPPS saat Pemilu 2019.

Salah satunya adalah mendesain TPS hanya untuk 300 pemilih maksimal sehingga total durasi pencoblosan hanya enam jam. KPU juga berencana membuat formulir perhitungan suara atau biasa disebut formulir C1 dalam format digital. ●

Besaran Anggaran Pemilu Bersifat Relatif



Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai besar atau kecilnya anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan di lapangan. Hal itu disampaikan dalam rangka menanggapi perkiraan Presiden Joko Widodo bahwa anggaran Pilkada dan Pemilu 2024 diperkirakan sebesar Rp110,4 triliun.

Namun, belakangan, Presiden Jokowi meminta agar biaya terse-

but dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap. Yaitu, Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun.

“Apa yang disampaikan presiden itu adalah lampu hijau terutama bagi pemerintah untuk bersama2 DPR menyetujui anggaran bagi Pemilu 2024. Angka Rp76 triliun, Rp110 triliun menjadi masih sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap Pemilu 2024,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis kepada Parlemenaria, Rabu (13/4/2022).

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini sebab utama yang membuat anggaran Pemilu 2024 lebih besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah karena terkait honorarium penyelenggara pemilu 2024 yang bersifat ad hoc. Mulai dari tingkat TPS, desa, hingga kecamatan, yang selama ini honorarium yang diterimanya terhitung kecil dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu.

“Dan mereka membanting tulang bahkan sebagian meninggal pada Pemilu 2019. Karena itu kita harus memproteksi hal ini, termasuk juga digitalisasi anggaran pemilu yang tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak kecil,” ujar legislator dapil Kalimantan Selatan I itu. ●



TETAP PROPORSIONAL TERBUKA

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU untuk menerapkan sistem pemilihan proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Soal kualitas caleg yang pandai meraih suara terbanyak atau yang berkualitas dalam proses sistem politik.

Amar putusan: Mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Tok! Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengetukkan palu. Jelas sudah sistem pemilihan umum legislatif pada 2024 tetap proporsional terbuka.

Terlebih lagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Maka permohonan uji materi untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pun tertolak sudah.

Dengan pembacaan putusan dalam sidang yang berlangsung Kamis, 15 Juni 2023 itu oleh Anwar yang juga ipar Presiden Joko Widodo itu, didampingi tujuh hakim konstitusi lain (karena hakim Wahiduddin Adams Absen), pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana bunyi Pasal 168 ayat (2): "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".

Mahkamah menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, ada yang menyambut gembira, di samping yang mungkin kecewa karena permohonan itu tertolak.

Pemohon uji materi ini antara lain adalah Demas Brian Wicaksono, kader PDI Perjuangan, Yuwono Pintadi kader Partai Nasdem, juga Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Mereka

mengajukan uji materi ke MK dengan permohonan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November 2022. Teregistrasi dengan nomor 114/PUU-XX/2022, uji materi itu menyoal sejumlah pasal di UU Pemilu yang bersandar pada Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

Nah, di tengah proses persidangan, si-lang pendapat tentang putusan MK itu

mengemuka dengan tambahan bocoran kemungkinan-kemungkinannya sebagaimana dikemukakan antara lain oleh bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat. Usai putusan, Denny bersyukur atas putusan MK itu.

"Alhamdulillah, atas putusan MK tersebut. Putusan yang tetap menerapkan sistem proporsional terbuka itu sesuai dengan harapan saya. Sudah pernah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya justru berharap informasi yang saya sampaikan, bahwa MK akan memutuskan kembali penerapan sistem tertutup, berubah dan tidak menjadi kenyataan," kata Denny.

Sedangkan PDIP yang dianggap menyetujui sistem proporsional tertutup menyatakan menerima putusan MK. "Dalam pandangan PDIP tentu untuk menghasilkan

anggota dewan berkualifikasi dalam membawa Indonesia yang mengalami kemajuan dalam seluruh aspek, anggota dewan harus disiapkan sebaik-baiknya dan itu melalui sistem proporsional tertutup. Namun mengingat PDIP taat terhadap konstitusi maka keputusan MK dengan penuh sikap kegarawanan diterima oleh PDIP," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Presiden Joko Widodo pun menyerahkan putusan soal uji materi itu kepada MK. "Tunggu MK saja. Karena apa? Setiap partai, setiap orang kan kalau ditanya itu, bisa beda-beda. Karena dua-duanya, ada kelebihan (dan) ada kelemahan," ujar Jokowi kepada wartawan di sela-sela kegiatan meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2023.

Sekarang, selamat bersaing untuk para calon anggota legislatif di Pemilu 2024. Bersaing dengan rekan caleg sesama partai juga dengan caleg dari partai lain. Terbuka. ●



Prabowo Subianto

DENGAN ATAU TANPA CAK IMIN

Calon Presiden sudah jelas.
Calon Wakil Presidennya
yang masih menjadi tanda
tanda. Prabowo Subianto
demikian juga.

Tujuh bulan menjelang Pemilihan Presiden 2024 semua capres menghadapi soal menentukan calon wakil presiden ini menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum yang dijadwalkan 19 Oktober-25 November 2025. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan mengikuti kontestasi sebagai Capres untuk kali ketiga, juga bukan perkecualian.

Sebagaimana wawancaranya dengan presenter Najwa Shihab di Narasi TV pada akhir Juni 2023. "Siapa yang paling potensial dari keenam nama yang beredar?" kata Najwa kepada Prabowo.

Sebelumnya Najwa sudah menyebut beberapa nama. Antara lain Erick Thohir, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah beredar di media.

Toh Prabowo menjawab diplomatis tanpa menyebut salah satu nama sebagai pilihannya. "Mereka itu enam-enamnya putra putri terbaik bangsa, masing-masing di bidangnya dengan usia masing-masing," kata Prabowo menjawab Najwa.

Tampaknya Prabowo melihat semua nama cawapres yang disebut Najwa dapat menjadi mitra kerjanya. "Jadi, saya lihat I can work with all of them, saya bisa bekerja dengan semua," sambung Menteri Pertahanan RI di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 itu.

Kemudian Najwa berupaya mendalami jawaban Prabowo dengan menanyakan potensi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Solo. Prabowo mengatakan proses pertimbangan mencari kandidat cawapres itu masih terus berjalan dan harus dilihat lebih jauh lagi.

"Tentunya (nama Gibran) termasuk dong (dipertimbangkan lebih jauh). Semua harus kita perhitungkan. Sekarang kan ada alat survey dan polling," jelasnya.

Najwa mencoba lagi menegaskan apakah nama Gibran yang paling memungkinkan di antara nama lain yang beredar. Namun, Prabowo justru kembali mempertanyakan hal tersebut pada Najwa seraya berkelakar. "Anda sampaikan kan berarti anda mengakui ada kemungkinan

kan?" kata Prabowo seraya tertawa diplomatis.

Dalam wawancara dengan Najwa itu pula Prabowo mengemukakan empat ingin menjadikan Ganjar sebagai cawapresnya. Namun, keinginan itu sirna lantaran PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres.

"Tadinya aku berharap sebetulnya bersama beliau (maju Pilpres 2024). Tapi, sekarang nggak bisa 'kan,' kata Prabowo Subianto disambut tawa penonton.

Meski demikian, Prabowo tampaknya masih tetap menaruh harapan pada Ganjar Pranowo. Sambil bercanda, Prabowo mengatakan akan mempertimbangkan Ganjar jika bacapres PDIP itu bersedia menjadi wakilnya. "Siapa tahu ujungnya Ganjar mau jadi wakil saya, kita pertimbangkan juga. Siapa tahu," ucapnya sambil tertawa.

Wawancara Prabowo dengan Najwa sedikit-banyak tampak membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam dinamika siapa cawapres yang benar-benar akan masuk dalam pendaftaran ke KPU. Kemungkinan berikutnya adalah perubahan peta koalisi partai-partai politik menjelang Pilpres 2024.

Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sejak Agustus 2022 yang dikenal dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, hingga empat bulan menjelang pembukaan pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres ke KPU, belum ada kepastian apakah cawapres Prabowo adalah Cak Imin atau figur lain yang disepakati.

Terkait atau tidak dengan wawancara Prabowo di narasi TV, yang terjadi kemudian adalah pertemuan tertutup elite Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, 9 Juli 2023. Usai

pertemuan, Prabowo menyatakan memang telah menandatangani kesepakatan politik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Selain Prabowo dan Muhaimin, tampak hadir dalam pertemuan tertutup itu adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Kemudian, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wasekjen PKB Syaiful Huda, dan lainnya.

"Saya sudah katakan, kita, PKB dan Gerindra, sudah tanda tangan suatu kesepakatan politik," kata Prabowo di halaman kediaman rumah Cak Imin, Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Prabowo mengemukakan, dengan adanya kesepakatan politik itu, Gerindra dan PKB siap melangkah dan membangun

permasalahan secara bersama-sama. Kesepakatan itu pula yang membuat kedua belah pihak "buka-bukaan" dalam pembicaraan tertutup yang berlangsung selama tiga jam.

"Kita buka-bukaan, saya, kita sudah sepakat, saya juga katakan, mereka dukung saya karena sesuatu, saya juga terima kasih dan saya juga hormati mereka," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan PKB akan sangat menentukan siapa cawapres yang bakal diusung oleh koalisi itu. Ia menyebut PKB dan Gerindra juga sudah menekan kesepakatan politik. Penentuan cawapres, kata dia, perlu pembahasan dan perhitungan matang.

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mengaku sangat berterima kasih kepada Muhaimin dan PKB yang telah mempercayai Gerindra dan menyatakan mengusungnya sebagai bakal capres. Ia menyatakan bahwa Gerindra dan PKB akan fokus pada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.

"Saya sangat terima kasih, kepercayaan PKB, kepercayaan dari pada Gus Muhaimin Iskandar," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyambangi kediaman Muhaimin yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Muhaimin mengaku menyambut Prabowo dan koleganya dengan suguhan air zamzam. "Kedatangan beliau langsung kita sambut dengan minum zamzam. Insya Allah segar, waras, sehat, menang," ujar Muhaimin sembari tertawa. ●





GANJAR PASTI PRESIDEN

Hati boleh panas, kepala hendaknya tetap dingin. Begitu sebaiknya dalam menanggapi ungkapan Ganjar pasti jadi Presiden.

Ungkapan Ganjar pasti jadi Presiden adalah ajakan untuk memikirkan apa saja yang perlu bagi kandidat presiden yang ingin memenangkan pemilihan secara demokratis. Termasuk siapa yang menjadi pasangannya, calon wakil presidennya.

Sudah pasti yang paling perlu untuk Ganjar, maupun calon presiden lainnya, adalah meraih dukungan suara 50 persen plus 1 untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Mungkin dalam satu putaran pemilihan, atau dua putaran seperti Pilpres di Turki yang berlangsung pada Mei 2023.

Nah, pengusung Ganjar sebagai capres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, optimistik jagoannya akan menang dalam Pilpres 2024. Malah Ketua DPP PDIP MH Said Abdullah lebih optimistik lagi: Ganjar bisa menang dalam satu putaran.

"Saya hakul yakin dengan rakernas ini dan turun di 65 titik, kok, rasa-rasanya, buang-buang energi kalau sampai dua putaran. Kami yakin Ganjar, satu putaran," ujar Said dalam konferensi pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan Rabu, 7 Juni 2023.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menambahkan, partainya merancang Ganjar Pranowo mengunjungi 65 titik di seluruh Indonesia. "Akan turun sampai bulan Oktober di 65 titik seluruh Indonesia," sambung Said.

Ia menjelaskan, 65 titik tadi sudah menjadi keputusan Rakernas PDIP. Selanjutnya, seluruh kader PDI Perjuangan akan turun ke masyarakat menggunakan pola nano targeting dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk.

Dalam kunjungan tersebut, para kader diharapkan melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Termasuk Pak Ganjar pun akan turun dari rumah ke rumah, kumpul dengan

masyarakat, menanyakan masyarakat apa kebutuhan mereka," kata Said yang berasal dari Sumenep, Madura, Jawa Timur ini.

Ganjar sendiri telah menunjukkan bagaimana penerapan nano targeting (sasaran hingga ukuran terkecil) dalam safarinya di Medan, Sumatera Utara, Minggu, 11 Juni 2023. Agenda safari Ganjar antara lain menghadiri konsolidasi dengan Tiga Pilar Partai bersama para relawan, bertemu tokoh lintas agama hingga berdialog dengan kelompok milenial.

Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumut sekitar pukul 11.10 WIB.

Dia tampak didampingi oleh para Ketua DPP PDIP,

yakni Djarot

Saiful Hidayat

hingga Ya-

sonna Laoly.

Ganjar yang

tampak

menganakan

baju berwarna

hitam, disambut

meriah oleh

Ketua DPD

PDIP Su-

mut Rapidin

Simbolon

dan Sekre-

teraris Soetarto

serta ratusan kad-

er PDIP yang telah

menunggu.

Tak hanya kader, se-

jumlah kepala daerah dari

PDIP juga turut menyambut

kedatangan Ganjar. Di anta-

ranya, ada Wali Kota Medan

yang juga menantu Pres-

iden Jokowi, Bobby

Nasution. Selain

itu, per-

wakil dari partai politik yang telah menyatukan kerja sama mendukung Ganjar, juga turut terlihat menyambut. Di antaranya, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perindo.

Seragam partai berwarna merah, hijau, kuning kunyit dan putih pun menyatu menyambut kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Teriakan Ganjar Presiden juga terdengar selama orang nomor satu di Jawa Tengah itu tiba di Bandara Kualanamu, Medan.

"Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo Presiden," seru ratusan kader yang menyambut Ganjar. "Jokowi Ganjar Presiden Adalah Kita," begitu teriakan lainnya dari massa Pospersa Sumatera Utara yang juga hadir.

Nah, dalam kesempatan peresmian Rumah Pemenangan Ganjar Pranowo di Medan, ia meminta seluruh relawan melakukan pendataan dengan mengumpulkan KTP demi menghitung jumlah kekuatan di Sumut. "Sekarang saya minta untuk mendata secara detail berapa jumlah anggota kita, siapa namanya, catat nomor teleponnya, minta foto copy KTP nya, semuanya," kata dia.

Rumah relawan ini, kata dia, akan digunakan untuk menyiapkan seluruh strategi saat Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah itu meminta

ribuan relawannya agar bekerja lebih teknis lagi dan berkolaborasi dalam misi ini.

Ganjar pun mengaku akan menagih data tersebut saat ia kembali ke Sumut. "Kalau tujuan kita sama, maka tugas kita bersinergi berkolaborasi. Dan rumah inilah kita pakai untuk menyiapkan semuanya," sambung-

nya. Ia berpesan pula agar seluruh relawan maupun pendukung tidak menggunakan isu-isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) saat berkampanye di media sosial. Menurut dia, materi kampanye akan disuplai langsung dari oleh tim kemenangan dari Jakarta.

"Saya masih kepingin ketika sudah terdata dengan baik dan saya datang lagi ke Sumut peluitnya tinggal ditiup dan seluruh kekuatan akan datang semuanya. Dan terakhir tolong betul betul kalau nanti kampanye atau sampaikan pesan ke medsos kita pakai kalimat positif dan baik. Saya titip betul agar kita tidak membawa isu isu SARA," tandas Ganjar.

Sedangkan Said mengungkapkan telah memetakan sejumlah isu yang akan menjadi bahan dialog dengan pemilih saat kunjungan Ganjar ke 65 titik tadi. Antara lain isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya serta isu pemberantasan korupsi. "Dua hal itu akan menjadi concern (perhatian) Pak Ganjar ketika turun ke bawah," ucapnya.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI mengatakan, kunjungan ke 65 titik tadi merupakan cara ampuh mendongkrak elektoral Ganjar. Alasannya, baru turun di lima titik saja, berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas Ganjar sudah naik hingga empat persen. Jadi, kata dia, jika Ganjar nanti bisa menuntaskan turun di 65 titik sampai Oktober 2023, diperhitungkan Ganjar akan menang satu putaran pada kontestasi Pilpres 2024.

"Kami pastikan bahwa sampai September, (turun ke) 38 provinsi, Pak Ganjar sudah bisa akan terpenuhi. Kalau bicara strategi, Bapak Ganjar itu baru turun di lima titik saja itu sudah naik 4 persen. Jadi, kami yakin Ganjar satu putaran," ucap Said.

Sedangkan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, dalam Rakernas III, salah satunya, dibahas mengenai strategi PDIP untuk menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Secara khusus, PDIP akan berupaya untuk meningkatkan suara di Jawa Barat dan Sumatera. ●



BUKA-BUKAAN BIAYA CALEG DEMI KURSI DI SENAYAN

Sebanyak 7.968 orang calon anggota legislatif (caleg) bertarung memperebutkan 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2019. Artinya, hanya sekitar 7,2 persen caleg yang bisa melenggang ke Senayan.

Ini pun masih menafikan dulu aturan parliamentary threshold. Hanya caleg dari partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 persen total suara sah nasional yang sebenarnya dihitung perolehan suaranya dan bisa ke Senayan berdasarkan urutan suara terbanyak di dapil masing-masing.

Mereka akan ber-



lom-
b a
mer-
aih sim-
pati warga.
Berbagai
cara diguna-
kan.

Dengan asumsi murni perebutan kursi berdasarkan hitungan jumlah caleg dan kursi itu saja, pertarungan antar-caleg di 80 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia sudah kasat mata sangat sengit.

Mereka akan berlomba meraih simpati warga. Berbagai cara digunakan, mulai dari masif me-

sang alat peraga kampanye seperti billboard dan baliho, hingga menyebar brosur. Ada pula yang memilih untuk lebih mengintensifkan sosialisasi dengan berkunjung ke rumah warga.

Banyak jalan menuju Roma. Beragam cara bisa digunakan. Namun, semua cara itu memerlukan dana yang tidak sedikit.

JEO ini menukil cerita para caleg mengupayakan jalan menuju Senayan, terutama yang berkaitan dengan biaya dan pernikernya. Konsekuensi yang membayangi, termasuk bayang-bayang korupsi setelah meraih kursi, melengkapinya pula.

Untuk memudahkan navigasi, JEO disajikan dalam beberapa "bab", dengan urutan sebagai berikut:

- Pengeluaran Caleg
- Politik Uang
- Kampanye Jor-joran, Celah

Korupsi saat Terpilih

PENGELUARAN CALEG

ONGKOS politik bagi caleg yang maju untuk tingkat DPR lebih besar dibandingkan mereka yang berlaga untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain wilayah kampanye yang lebih banyak, ada pula sejumlah faktor lain yang membuat ongkos caleg DPR membengkak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz bahkan memperkirakan nilai ongkos seorang caleg untuk menjadi anggota DPR bisa mencapai belasan miliar rupiah.

Angka pasti total dana kampanye sangat sulit didapatkan apalagi dipastikan.

~Donal Fariz, ICW~

Angka pasti total dana kampanye, sebut Donal, sangat sulit didapatkan apalagi dipastikan.

"Kami tidak bisa dapatkan data riil, karena mereka tidak jujur," ucap Donal.

Laporan keuangan yang dibuat caleg pun tak bisa menjadi pegangan karena tidak menunjukkan situasi nyata di lapangan.

Meski demikian, Kompas.com mewawancarai empat orang caleg yang bersaing dalam Pemilu 2019 kali ini. Mereka bersedia memaparkan pendanaannya selama menjadi caleg. ●

CERITA CALEG KE SENAYAN

Keempat caleg itu adalah Arsul Sani (caleg PPP dapil Jawa Tengah X), Johan Budi (caleg PDI-P dapil Jawa Timur VII), Basri Mappaseng (caleg Gerindra dapil DKI Jakarta II), dan Dian Fatwa (caleg PAN dapil DKI Jakarta II).

Seperti apa cerita mereka?

Arsul Sani harus memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihannya. Dia memperkirakan harus meraih 230.000 suara untuk mengamankan satu kursi di Senayan. Karenanya, Arsul banyak mengerahkan jaringan tim dan relawannya ke seluruh pelosok dapil.

Arsul mengaku, selama lima bulan berkampanye, dana yang sudah dia keluarkan mencapai Rp 2,5 miliar. Pengeluaran terbesar, sebut dia, adalah untuk mengerahkan para relawan.

Menurut dia, para relawan ini bertugas mensosialisasikan Arsul ke berbagai kalangan dan juga membantu memasang atribut kampanyenya.

Sekretaris Jenderal PPP ini menuturkan ada 8.000-10.000 relawan yang bekerja di bawahnya. Satu relawan mendapatkan "uang lelah" di kisaran Rp 200.000 sampai Rp 500.000.

Selama lima bulan berkampanye, dana yang sudah Arsul keluarkan mencapai Rp 2,5 miliar.

"Kalau dia tinggal di perkotaan ya sekitar Rp 200.000-Rp 300.000. Kalau dia jauh di pegunungan ya kita beri Rp 500.000 karena dia butuh berkali-kali naik transport kalau harus ketemu saya," ungkap Arsul.

Namun, seluruh relawan itu tidak sepenuhnya dibayar Arsul seorang. Arsul bekerja sama dengan caleg lain dari PPP di tingkat DPRD kota/kabupaten dan DPRD Provinsi. Sehingga, dia bisa berbagi ongkos dengan caleg lain itu untuk membiayai relawan.

Setelah untuk relawan, Arsul menuturkan pos anggaran kedua yang dia siapkan sebagai caleg adalah biaya atribut kampanye.

Menurut Arsul, biaya yang dia habiskan untuk alat kampanye sangat kecil, meski tidak menjabarkan angka rincinya. Dia mendapatkan banyak bantuan dari keluarga dan teman-temannya untuk mencetak atribut kampanye, mulai dari bendera hingga cenderamata.

"Kalau ada bantuan teman-teman, itu ada yang bikin kaos seki-an, cetakin bendera seki-an. Ada yang kasih cenderemata. Centong,

misalnya. Itu kan murah, harganya Rp 2.500 atau Rp 3.000. Bikin 5.000 saja, hanya Rp 12 juta-an," ucap Arsul.

Sementara itu, untuk biaya saksi pada saat hari pemungutan nantinya, Arsul menuturkan PPP yang akan lebih banyak membantunya. Namun, dari pengalamannya pada Pemilu 2014, dia juga tetap harus mengeluarkan dana untuk saksi.

"Kita iuran sedikit-sedikit saja. Enggak sampai di atas Rp 500 juta-an," ujar Arsul.

Arsul mengaku biaya kampanye ini sebagian besar berasal dari kantong pribadinya. Sebelum menjadi anggota DPR, dia berkariir sebagai pengacara perusahaan hingga akhirnya menjadi direktur di sebuah perusahaan asing selama 14 tahun.

Dia lalu menjadi komisaris di perusahaan itu hingga akhirnya memutuskan menyudahi karier swastanya dan bergabung dengan partai politik pada 2009.

"Saya duitnya masih banyak waktu itu karena kan baru pergi dari komisaris. Saya sekolah (di luar negeri) tanpa beasiswa saja masih kuat kok," seloroh Arsul.

Maju sebagai caleg untuk pertama kalinya membuat Basri Mappaseng mempersiapkan banyak hal, mulai dari tim hingga dana kampanye. Soal dana kampanye, Basri mengaku tak ingin jor-joran. Dia pun hanya mau menggunakan dana dari kocek pribadinya.

"Saya enggak mau membebani orang. Saya memang jujur, betul-betul murni memakai uang sendiri," kata Basri yang belasan tahun bolak-balik Jakarta-Kuala Lumpur untuk mengurus bisnis dan pekerjaannya di sana dan di Jakarta.

Selama lima bulan berkampanye, Basri mengaku hanya

mengeluarkan dana ratusan juta rupiah, tak sampai Rp 1 miliar.

"Saya enggak jor-joran. Mungkin kalau lihat di sekeliling Jakarta, utamanya kayak poster, baliho, banner, itu (saya) kurang, seperti caleg lain yang buat baliho yang besar sekali. Saya kira masyarakat sekarang bisa menilai, loh ini jor-joran nanti balikin uangnya bagaimana?" ucap Basri.

Basri mengaku hanya mengeluarkan dana ratusan juta rupiah, tak sampai Rp 1 miliar.

Basri mengaku, meski tak sebanyak caleg lain, proporsi biaya untuk alat peraga kampanye (APK) tetap yang paling menyita sumber dana kampanyenya. Setelah APK, Basri mengaku ongkos menjamu masyarakat saat dia bersosialisasi ke rumah-rumah juga cukup banyak menyita dana kampanye.

"Misalnya ada pengajian, majelis taklim, sosialisasi, PKK, pelatihan, kami-lah yang mengurus konsumsinya. Tapi konsumsinya pun murah. Ya buat beli kue, snack, segala macam," ucap dia.

Setiap bertemu masyarakat, Basri juga kerap membagikan souvenir berupa pashmina bagi ibu-ibu. Awalnya, Basri berkampanye tanpa memberi cenderamata apa pun kepada masyarakat, tetapi dia khawatir dilupakan warga.

Sebagai caleg baru yang ditempatkan di nomor urut paling buncit, Basri harus bekerja keras mempopulerkan namanya. Dia pun berkeliling Jakarta setiap hari.

Dalam satu hari, dia memiliki jadwal lima kali bertemu warga. Di akhir pekan, jadwalnya semakin padat karena bisa mengunjungi enam sampai tujuh titik.

Basri menghi-

tung, sejak pertama kali berkampanye, setidaknya sudah ada 300 titik di Jakarta yang dia kunjungi. Hal ini juga menyita ongkos. Selain konsumsi itu tadi, tentu juga biaya transportasi.

Sedangkan untuk pengerahan tim dan relawan, Basri mengaku tak memiliki anggaran khusus. Tim yang bekerja di bawahnya hanya dibayar ongkos transportasi pengganti.

Sementara tim yang mengurus kampanyenya lewat media sosial ataupun menyiapkan materi promo adalah anak-anak buahnya di perusahaan teknologi informasi di Jakarta.

Dalam upaya perdananya mengincar kursi di Senayan, Johan Budi harus bersaing keras. Daerah pemilihan Jawa Timur VII bahkan dijuluki dapil neraka untuk memperebutkan 7 kursi.

Di sana ada caleg petahana dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang merupakan anak dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada pula rekan satu partai Johan, Budi-man Sujatmiko, yang kembali maju menjadi caleg. Selain itu, ada pula Supriyanto yang merupakan caleg petahana dari Partai Gerindra.

Menurut Johan Budi, dia terbilang "santai" berkompetisi dalam pileg kali ini. Dia juga tak menggelontorkan dana "jor-joran".

Dana kampanye yang disiapkan pun dia kontrol ketat. Tak ada pula tim sukses yang secara khusus dibentuk Johan di dapilnya.

"Makanya, mungkin Anda enggak percaya juga. Saya kalau ke daerah cuma berhubungan sama satu orang. Dia ini kadang jadi driver, pokoknya yang nganterlah. Orang pada bingung timnya mana," ucap Johan.

Johan mengaku sebagian besar dana kampanyenya berasal dari tabungan serta hasil menjual rumah beberapa bulan sebelum dia memutuskan menjadi caleg. Ada pula bantuan partai atau teman, tetapi dalam bentuk pencetakan alat peraga kampanye (APK).

Sudah ratusan juta rupiah dana yang Johan keluarkan. Namun, dia menolak secara rinci menyebut jumlah pasti.

Selama lima bulan berkampanye, Johan mengaku sudah ratusan juta rupiah dana yang dia keluarkan. Namun, dia menolak secara rinci menyebut jumlah pasti dana yang sudah dia rogoh setelah menjadi caleg. ●



Hajjah Delmeria Sikumbang,

PEDULI MEMENUHI ASPIRASI



Berkunjung ke Kafe Ahaan Reborn, Dolok Sanggul dan Aula Pertemuan Gereja HKBP Parililitan, pensiunan pegawai Kementerian Agama ini menyerahkan 600 set alat bantu disabilitas dan lansia senilai hampir Rp280 juta. Bentuk bantuannya antara lain kursi roda, tongkat dan paket sembako bagi penyandang disabilitas dan lansia se-Kabupaten Humbahas.

Dalam kesmepatan itu Delmeria mengungkapkan bantuan atensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) tadi merupakan kerja sama yang baik antara Kementerian Sosial RI dengan Komisi VIII DPR RI. Ia mengemukakan pula, sebagai anggota legislatif yang terpilih dari Dapil Sumut II, yang mencakup pula warga Humbang Hasundutan salah satu konstituennya, ada amanat aspirasi yang harus ia perjuangkan baik secara langsung maupun melalui tenaga ahlinya yang turun melakukan pendataan.

Menurut dia, ada banyak sekali warga dari seluruh Indonesia yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Perhatian tersebut bisa berupa perbaikan jalan, irigasi, fasilitas publik lainnya termasuk perhatian kesejahteraan sosial, khususnya penyandang disabilitas dan lansia. Nah, sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Kemensos RI, yang membidangi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ia bersyukur dapat membawa sedikit perhatian tersebut ke daerah pemilihannya di Sumut II.

"Bantuan yang Bapak dan Ibu terima hari ini, berkat doa kita bersama. Aspirasi yang saya terima baik langsung maupun melalui tenaga ahli, kita teruskan ke

pemerintah pusat. Dan alhamdulillah, berkat doa kita bersama, aspirasi itu diamin oleh pemerintah dan saat ini sudah Bapak dan Ibu nikmati," ungkapnya.

Untuk itu, sambungnya, mohon penggunaan dan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. "Gunakan untuk mendukung dan menopang aktivitas bapak dan ibu selama ini," tambahnya.

Delmeria pun mendorong, agar penyandang disabilitas dan lansia tetap berusaha menjadi warga yang produktif sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. "Jangan jadikan keterbatasan menjadi penghalang. Optimalkan potensi diri dan tetaplah memberi manfaat bagi orang lain," ujarnya.

Mewakili penerima bantuan, Berliana Barus, 56, warga Parililitan, mengaku salut atas kepedulian Delmeria Sikumbang dan suami M. Syarfi Hutaaruk, yang berkenan berkunjung ke daerahnya untuk menyalurkan bantuan.

Meskipun bukan orang Humbang Hasundutan, Delmeria dan Syarfi rela datang dari Jakarta untuk bertegur sapa dengan warga khususnya penyandang disabilitas dan lansia. "Padahal, setahu kami suara ibu dulu waktu pemilihan, gak nya banyak-banyak kali dari kampung kami ini. Tetapi, ibu sama perhatiannya dengan daerah-daerah lain yang mungkin jauh lebih banyak memilih ibu daripada kami di sini," katanya.

Ia pun mendoakan Delmeria dan M Syarfi Hutaaruk semakin semangat memperjuangkan rakyat dan semakin sering berkunjung ke daerah untuk berbagi kepedulian dan bantuan. "Semoga ibu Delmeria dan Pak Syarfi, sehat selalu. Dalam lindungan Tuhan, dan tetap memperjuangkan rakyat di daerah," ucapnya.

Banyak lagi bantuan yang tercatat mengalir kepada warga melalui Delmeria. Termasuk untuk kalangan muda antara lain untuk pengembangan sepak bola di Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Agustus 2022.

"Bantuan ini tidak seberapa, ini bantuan pemerintah pusat, yang diperpanjangtanggalkan kepada saya, karena saya dipilih oleh orang kampung kita ini, kena

kita bergaduh, apa salahnya mereka yang membantu kampungnya sendiri, saya anggota DPR, saya bisa saja alihkan saja ke Padang dan tidak mesti ke dapil saya, tapi demi cinta kampung halaman Sibolga Tapteng ini, khususnya Sorkam," sambungnya.

Toh Delmeria yang mencalonkan diri lagi dalam Pemilu Legislatif 2024 memang perlu lebih banyak menggalang suara di luar basis suaranya yang berada di Kota Sibolga dan sekitarnya. Sedangkan kedatangannya di Humbahas pada Maret 2023 itu mendapat sambutan meriah dari sejumlah tokoh dan warga masyarakat setempat, baik dari unsur pemerintah, maupun FKUB, forum kerukunan umat beragama.

Delmeria Sikumbang merupakan satu dari 19 perempuan politisi NasDem yang duduk sebagai anggota DPR RI. Dia berhasil meraih kepercayaan masyarakat karena dinilai sangat dekat dengan masyarakat.

Meski tidak banyak publikasi dari media, masyarakat Sibolga mengenal Delmeria sebagai tokoh yang aktif dalamember-

dayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Delmeria Sikumbang lahir di Cupak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 30 Juni 1960.

Sejak remaja aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Karier politiknya terus bertumbuh bersama sang suami Syarfi Hutaaruk, Wali Kota Sibolga dua periode. Dalam struktur kepartaian NasDem, Delmeria menduduki posisi Ketua DPD NasDem Kota Sibolga.

Sebagai politisi, nama Delmeria di Sibolga cukup berkibar sebagai penggerak pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019. Selanjutnya melaju ke Senayan. Pada 2024 Delmeria menjadi petahana dari Dapil Sumut II dengan segala dinamikanya.♦



Muhamad Yaser

TINGGALKAN PAN, BIDIK KURSI SENAYAN

Muhamad Yaser, yang menjabat sebagai Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mantap keluar dari partainya dan memilih bergabung dengan Nasdem. Di tahun 2024 mendatang Yaser juga sudah memilih untuk berkarir ke jenjang lebih tinggi yakni DPR RI.



Nama Muhamad Yaser saat ini cukup mencuat setelah politisi muda ini memilih keluar dari PAN dan secara terang-terangan pindah ke Partai Nasdem Sumsel yang dipimpin Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Herman Deru sendiri tidak lain adalah mertua dari Muhamad Yaser sendiri.

Sayangnya meski secara terbuka meninggalkan PAN namun suami dari Hj Samantha Tivani tidak mau meninggalkan statusnya sebagai anggota DPRD Sumsel. Hal inilah yang membuat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel merasa kesal pada sikap menantu Gubernur Herman Deru, Muhamad Yaser tersebut.

DPW PAN menegaskan, meski sudah menyatakan bergabung ke Partai Nasdem namun Yaser enggan mundur sebagai kader PAN demi tetap duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). Padahal yang bersangkutan memajukan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai NasDem pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kami berharap Yaser itu punya etika, punya sopan santun politik sementara dia tidak pernah mengaku dari PAN. Harusnya dia mundur dari PAN itu namanya etika politik, jangan selemaknyo dewek,, mentang-mentang, politisi muda. Dia harusnya menjunjung tinggi etika politik menghargai mertuanya yang ketua Nasdem kalau ini dia anak muda yang tidak punya etika," kata Wakil Ketua DPW PAN Sumsel Abdul Aziz kepada awak media, Kamis (11/5) saat itu.

Abdul Aziz mengungkapkan, hal itu dilakukan Muhamad Yaser kalau dirinya baru akan mundur sebagai kader PAN setelah tahap Daftar Calon Tetap (DCT) dikeluarkan oleh KPU.

Namun kemelut ini akhirnya secara perlahan berakhir. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN)

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan, proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Banyuasin Muhamad Yaser, sudah disetujui DPP PAN.

Proses PAW dari PAN sendiri ternyata mengalami proses yang cukup panjang untuk menentukan siapa pengganti Muhamad Yaser selanjutnya.

"Seharusnya mereka yang duduk di legislatif saat ini wajib maju kembali sebagai Bacaleg dari PAN, dan DPP telah mengeluarkan persetujuan untuk pergantian itu," kata Azis.

Untuk pengganti PAW M Yaser sendiri, dikatakan Azis seharusnya kepada inisial H yang meraih suara terbanyak kedua, namun yang bersangkutan yang juga merupakan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Banyuasin Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Tahun 2024, telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PAN mulai tanggal 22 Juni 2023. Sehingga statusnya untuk PAW hilang.

Terkait dengan pengunduran diri ini, Azis secara blak-blakan mengatakan jika itu adalah keputusan pribadi.

"Boleh-boleh saja. Kita akan mempercepat proses Pengganti Antar Waktu (PAW) lebih cepat. Itu adalah pilihan yang sudah dia ambil, dan sejauh ini proses PAW sedang berjalan," tandasnya.

Ditambahkan Azis, untuk proses PAW ini sendiri sudah ada persetujuan dari DPP PAN, dan tinggal proses administrasi di DPRD Sumsel.

Sementara Muhamad Yaser sendiri seperti lebih fokus pada sosialisasi pencalonannya sebagai Anggota DPR RI dari Partai Nasdem 2024 mendatang.

Berbagai tempat tersebar poster-poster politisi muda kelahiran, 3 Maret 1987 itu yang bertuliskan Road To DPR RI.

Muhamad Yaser juga cukup rajin mendampingi Gubernur Herman Deru, sang mertua saat melakukan kunjungan kerja di wilayah

Daerah Pemilihan (Dapil) I seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau serta Kota Palembang sendiri.

Sosok Muhammad Yaser mulai dikenal masyarakat saat diketahui menikahi Hj Samantha Tivani, putri Gubernur Herman Deru yang juga berencana mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil II.

Rupanya alumni S1 Universitas Sriwijaya ini dikenal cukup aktif di berbagai kegiatan organisasi kepemudaan bahkan sempat menjadi pengurus OSIS di SMA PGRI 1 Betung Banyuasin.

Yaser juga sempat menjadi Wakil Ketua KNPI Palembang serta menduduki kursi Wakil Ketua KNPI Sumsel.

Jalan Muhamad Yaser untuk menuju kursi Senayan tentu tidak mudah. Selain harus bersaing dengan para incumbent, dia juga berkompetisi dengan para pendatang baru lainnya.

Beberapa pendatang baru yang punya peluang besar itu antara lain, Hj RA Anita Noerhathi kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel. Kemudian Kartika Sandra Desi, dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Selain itu Muhamad Yaser juga harus bersaing dengan H Fauzi Amro, anggota DPR RI dari Partai Nasdem serta beberapa politisi senior lainnya.

Berdasarkan data, Dapil I Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau.

Dapil I menyediakan sebanyak 8 kursi yang akan dipersebutkan puluhan kontestan dengan target sama-sama lolos ke DPR RI. ●



PEMILU DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI CAPAI 5 PERSEN

Penyelenggaraan pemilu yang akan dilakukan triwulan 1-2024 diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5 persen. Gelontoran dana pemilu merangsang konsumsi masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

”Untuk pemilihan mendatang, saya pikir kami mengharapkan produk domestik bruto Indonesia benar-benar tumbuh sekitar 5 persen. Jadi angka pertumbuhannya masih bagus sehingga kita berharap Pemilu 2024 masih menjadi tahun yang positif,” ujar Head of Research DBS Group Maynard Arif dalam jumpa pers proyeksi perekonomian Indonesia, Selasa (16/5/2023).

Maynard menambahkan, penyelenggaraan pemilu cenderung mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Ri-



dong konsumsi masyarakat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi tahun itu. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 di mana konsumsi masyarakat tidak maksi-

itu yang tengah melambat.

Ekonom Senior DBS Research Group, Radhika Rao, mengatakan, berdasarkan riset dari empat pemilu sebelumnya, pe-

konsumsi mulai dari tiga triwulan sebelumnya hingga satu triwulan sebelum pemilu. Pertumbuhan ini dipicu belanja kampanye yang mendorong konsumsi masyarakat.

Namun pada yang sama, lonjakan permintaan masyarakat ini juga berpotensi memicu kenaikan inflasi. Untuk menciptakan pertumbuhan yang optimal, inflasi pun harus dikendalikan.

Grafik yang menunjukkan pertumbuhan kredit baru, pertumbuhan kredit baru per jenis kredit, pertumbuhan kredit baru per jenis kredit konsumsi, sektor ekonomi, serta saldo bersih tertimbang pertumbuhan kredit baru tertinggi dalam hasil Survei Bank Indonesia yang dirilis 26 April 2023.

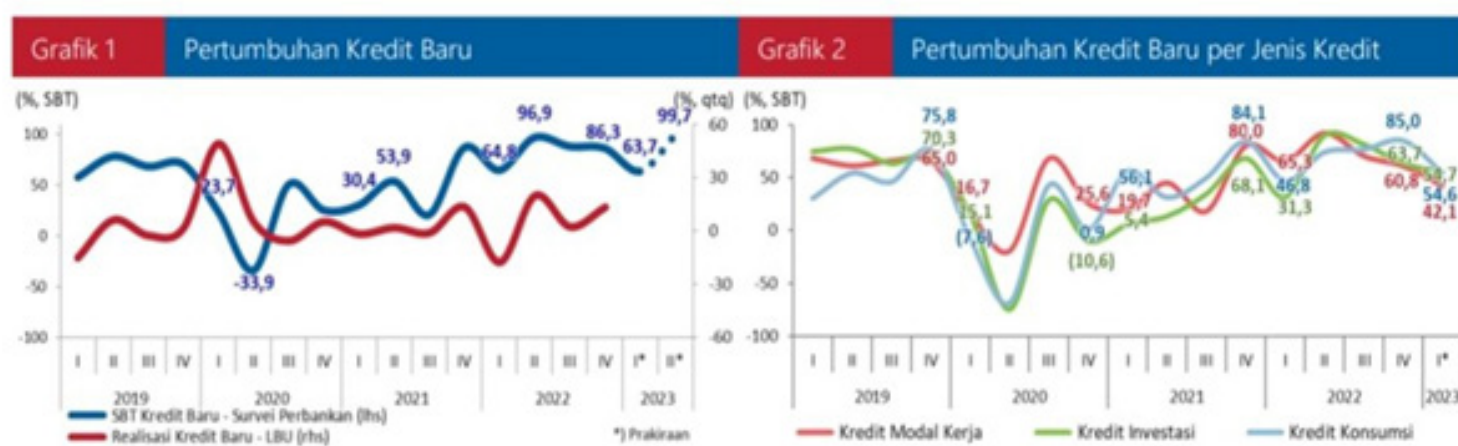
Triwulan keempat

Pada kesempatan berbeda, Chief Economist Citi Helmi Arman menjelaskan, konsumsi masyarakat akan sangat terdorong pada triwulan keempat tahun ini. Sebab, pada periode ini, konsumsi masyarakat terdorong belanja pemilu atau satu triwulan sebelum diselenggarakan pemilu.

Selain itu, menjelang berakhirnya pemerintah berakhir, biasanya belanja pemerintah akan dikebut untuk berbagai pembangunan infrastruktur. Gelontoran belanja pemerintah ini mendorong efek domino perekonomian. Belum lagi belanja masyarakat yang secara historis akan meningkat pada triwulan keempat tahun ini.

Kondisi pandemi yang sudah mereda juga akan mendorong kembali aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara bakal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

”Dengan berbagai rangsangan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan menembus lima persen,” ujar Helmi.



Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru terutama terjadi pada sektor Perikanan (SBT 53,8%), diikuti oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (SBT 51,0%), dan sektor Transportasi, Pergudangan & Komunikasi (SBT 47,1%) (Grafik 4).



PEMILU 2024 JADI AJANG 'PANEN' UNTUK EKONOMI RI



demokrasi di Tanah Air yang akan dilakukan serentak pada 2024 diperkirakan akan memberikan sumbangan terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David E. Sumual menuturkan bahwa faktor pemilihan umum (Pemilu) dapat memberikan sumbangan sekitar 0,15% - 0,2% dari baseline pertumbuhan ekonomi. "Terutama di 2024 karena di 2024, ada kemungkinan Pemilu sebanyak 3 kali, Pemilu Presiden, Legislatif dan putaran kedua untuk Presiden dan juga ada Pemilu Pilkada," papar David, Rabu (31/5/2023).

"Jadi baru kali ini daya dorong dari sisi kegiatan politik cukup besar, sebelumnya kita belum pernah mengalami kemungkinan sampai 3 kali," ujar David.

Oleh karena itu, David yakin dampak multiplier effect sangat signifikan. "Kita lihat dari setiap dari 5 tahun sekali kita melakukan pemilu itu cukup besar, money multiplier-nya cukup kuat," sambungnya.

Kemudian dari sisi konsumsi terutama dari lembaga non-profit akan cukup besar menyumbang pertumbuhan untuk beberapa sektor seperti retail terkait pakaian, lalu media, logistik, dan transportasi. Sektor tersebut biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat. Menurut David, pertumbuhan ini terlihat dari data di bursa.

"Jadi untuk sektor yang saya sebutkan tadi itu pertumbuhan revenu-nya cukup kuat," tegasnya.

Adapun untuk investasi, dia menilai penurunan tidak akan signifikan. Investor, kata David, sudah bisa memperkirakan kondisi di lapangan. "Kondisinya itu sudah bisa diperkirakan, ya mereka sudah masuk duluan, jadi mereka enggak mau ketinggalan."

Lebih lanjut, saat Pemilu, indikator kredit dan kurs atau nilai tukar umumnya baik. Alhasil, David melihat stabilitas politik Indonesia pada 20 tahun terakhir tetap terjaga. Itu adalah satu hal positif yang bisa dijual ke investor.

"Jadi tidak seperti di negara lain setelah pemilu suka berantem bahkan perang, kalau kita bergabung sinergi. Ini juga yang

berkontribusi positif buat ekonomi," ujarnya.

Dampak Ekonomi Makro Indonesia

Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan umum pada bulan Februari 2024. Menurut penelitian tim DBS Macro and Strategy, secara umum, pertumbuhan ekonomi melambat menjelang pemilu dan pulih dalam satu triwulan setelahnya. Investasi dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah menguat segera setelah proses jajak pendapat (exit poll) selesai.

DBS Macro and Strategy Team menganalisis tren ekonomi dan pasar Indonesia sehubungan dengan siklus pemilihan umum. Analisis ini didasarkan pada empat episode terakhir, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu tahun 1999 tidak dimasukkan dalam analisis ini karena adanya gejala signifikan dalam variabel ekonomi pada tahun tersebut akibat dampak krisis keuangan Asia. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diadakan pada bulan Juni, jajak pendapat mendatang kali ini dijadwalkan pada bulan Februari.

Dampak pemilu terhadap PDB

Berdasarkan kecenderungan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pertumbuhan cenderung melambat hingga dua triwulan sebelum pemilu, kemudian stabil, sebelum akhirnya menguat. Observasi ini didukung oleh sikap berhati-hati para pelaku ekonomi menjelang siklus pemilu, mengingat kemungkinan adanya perubahan dalam agenda ekonomi dan peraturan. Ketika hasil jajak pendapat tidak resmi diumumkan, kegiatan ekonomi akan berlanjut seperti biasa.

Selain itu, DBS Macro and Strategy Team juga memperhatikan kecenderungan konsumsi rumah tangga, yang memberikan kontribusi lebih dari setengah dari total pertumbuhan ekonomi. Menariknya, dalam empat pemilu terakhir, konsumsi cenderung meningkat hingga satu triwulan sebelumnya, kemudian stabil dengan sedikit penurunan.

Tren ini kemungkinan mencerminkan peningkatan permintaan dan pengeluaran selama periode kampanye menjelang pemungutan suara, serta pengeluaran sebelum hari raya. Setelah periode tersebut berlalu, permintaan kemungkinan akan

kembali ke jalur sebelum pemilu.

Namun, perlu dicatat bahwa terdapat faktor lain yang tidak biasa dan siklus bisnis pada tahun-tahun tersebut yang juga dapat memengaruhi kecenderungan konsumsi dan pertumbuhan secara keseluruhan. Tahun 2009 berhasil mengantisipasi tren ini setelah krisis keuangan global, sementara tahun 2014 menandai stabilisasi setelah Bank Sentral AS mengurangi kebijakan moneter (taper tantrum) pada tahun 2013, yang berdampak lebih pada pasar daripada perekonomian.

DBS Macro and Strategy Team juga memantau pengeluaran pemerintah, terutama kegiatan pemerintah pusat (total pengeluaran). Pengeluaran cenderung melambat pada triwulan sebelum pemilu, sebelum akhirnya meningkat. Hal ini berlaku baik untuk pengeluaran fiskal nominal maupun riil (disesuaikan dengan inflasi). Hal ini mungkin mencerminkan gagasan bahwa pemerintahan baru yang akan datang mungkin akan memprioritaskan kembali alokasi pengeluaran, yang dapat memperlambat pencairan dana menjelang pemilu. ●



3 TARGET KETUA DPW NASDEM SUMSEL HERMAN DERU DI PEMILU 2024



Ketua DPW Partai NasDem dan sekaligus Gubernur Sumsel, H Herman Deru menegaskan targetnya soal pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang.

Target Herman Deru di pemilu 2024 mendatang diungkapkannya saat menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi DPW Nasdem Sumsel di Hotel Aryaduta, Minggu 26 Februari 2023.

Menurut Ketua DPW Partai NasDem, H Herman Deru, target dalam menghadapi Pemilu 2024 yang dicanangkan pihaknya satu frekuensi dengan keputusan serta arahan dari DPP NasDem.

Satu frekuensi yang dimaksud Ketua DPW Partai NasDem, H Herman Deru, ialah 3 target yang dicanangkan memenangkan semua kontestasi di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

"Target kita (di Pemilu 2024) menang Pilpres (pemilihan presiden), Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah)," tegas Herman Deru.

Meski demikian, Herman Deru meminta kader NasDem di Sumatera Selatan untuk fokus dalam target pertama dan kedua yang harus dicapai.

"Tapi tentu ada target (pemilu 2024) jangka pendek untuk satu tahun kedepan ini adalah Pileg (pemilihan legislatif) dan

Pilpres (pemilihan presiden)," ujar Herman Deru.

Untuk mewujudkan target pemilu 2024 dari DPW NasDem tersebut, Herman Deru meminta seluruh jajaran anggota Partai NasDem akan berjuang dengan sekuat tenaga.

Bahkan, target tinggi pemilu 2024 yang dicanangkan oleh Herman Deru kepada calon legislatif yang akan bertarung di masing-masing daerah pemilihan atau dapil.

"Saya berharap setiap Dapil (daerah pemilihan) di Sumsel atau Sumatera Selatan dapat minimal 2 kursi," harap Herman Deru.

Polda Sumsel Pastikan Siap Amankan Pemilu 2024

Polda Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan siap untuk mengamankan pemilu 2024 mendatang. Saat ini Polda Sumsel telah mempersiapkan pengamanan dan antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pilkada nanti.

"Dari pengalaman di 2019 lalu akan menjadi pelajaran kami untuk mengantisipasi dari mulai hal yang kecil hingga hal yang bisa menghambat pelaksanaan pemilu nanti," kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi, Jumat, 26 Mei 2023.

Supriadi mengatakan untuk persiapan pengamanan dan antisipasi telah dilakukan mulai sekarang. Dalam skemanya adalah mitigasi, antisipasi, dan inventarisasi, kemudian dicarikan solusi sehingga

nanti pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar.

"Kami juga sudah menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya



Target kita (di Pemilu 2024) menang Pilpres (pemilihan presiden), Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah)

dengan Komisioner KPU Sumsel," ungkapnya.

Pihaknya juga mengajak dan mengimbau kepada masyarakat Sumsel untuk sama-sama mengikuti pelaksanaan sesuai dengan aturan dan tidak terpecah belah dalam pilkada nanti.

"Mari kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban yang ada saat pemilu ini, siapapun pilihannya silakan, tergantung masing-masing," katanya. ●



Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, S.H., M.Hum menjadi Keynote Speaker Seminar Kedaerahan dengan tema “Pemilu Damai Menuju Tahun 2024, Menyongsong Tahun Politik yang Berkualitas dan Berintegritas serta Mencerdaskan” yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Fakultas Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Gubernur Sutarmidji menjelaskan bahwa tema Seminar Daerah yang diambil kali ini sangat menarik. Dimana ketika berbicara dunia politik ini, dirinya sudah melakoninya selama 42 tahun yakni sejak tahun 1981. Walaupun sebelumnya dirinya adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

“Saya memberanikan diri untuk langsung terjun ke dunia politik. 7 tahun menjadi anggota DPRD, 5 tahun menjadi Wakil Walikota, 10 tahun menjadi Walikota dan sekarang menjadi Gubernur”, ungkapnya.

Dirinya menilai bahwa kualitas dari Pemilu dari waktu ke waktu tergantung dari sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Hiruk pikuk tentang Pemilu berkualitas, berintegritas dan mencerdaskan buat penyelenggara harus memperoleh kepercayaan yang maksimal dari masyarakat.

Kemudian Gubernur Kalbar mengingatkan Partai Politik untuk bersikap dewasa, dimana hal yang menarik apabila Partai Politik memberikan pembekalan atau pendidikan yang matang kepada para anggota maupun kadernya terutama yang mau menjadi anggota legislatif atau eksekutif, yakni pimpinan daerah.

“Selama Penyelenggara Pemilu, apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi maka kualitas dari Pemilu itu akan semakin baik, tapi kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah maka sehebat apa pun orang yang lahir dari konstelasi itu seperti anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah, itu tidak akan bisa menjadikan pemimpin - pemimpin yang berintegritas”, terangnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalbar juga mengakui bahwa dirinya selalu percaya akan hasil survey, dan selalu menganalisis itu. Pria kelahiran Pontianak ini juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah empat kali melakukan survey, walaupun dirinya incumbent.

“Dimana ketika sewaktu Pemilihan Walikota yang pertama sebelum pemilihan, kami berada di angka 72 sampai 74 persen sedangkan lawan hanya berkisar di 20 %. Dari pertimbangan tersebut saya memutuskan untuk maju menjadi Walikota dan berhasil mendapatkan suara sebesar 34 %. Kemudian pada Pemilihan Walikota untuk Periode kedua kami



GOVERNUR SUTARMIDJI :

MARI BANGUN PEMILU 2024 YANG BERKUALITAS

tidak berkampanye, karena kami sudah mensurvey calon-calon lainnya hanya mendapatkan persentase 10 persen, dan hasilnya Alhamdulillah waktu itu bersama Pak Edi Kamtono mendapatkan suara sebesar 52 %. Ini penting, untuk mengetahui dimana kelemahan kita, apa isu yang menarik, semuanya harus kita ketahui supaya masyarakat mendapatkan pemahaman dan pendidikan yang benar”, ungkapnya.

Selanjutnya berbicara tentang lawan politik, Sutarmidji mengingatkan untuk bersikap dewasa. Dirinya mengatakan bahwa dalam politik, musuh politik itu bisa menjadi sahabat yang sangat akrab.

“Jangan menjadikan lawan politik itu musuh, tapi diajak diskusi, adu argumen saja, dimana kebanyakan orang beranggapan beda partai adalah beda musuh, jangan seperti itu. Persaingan itu jangan membodohi masyarakat, buat cerdas, jelaskan apa adanya, sampaikan dengan santun. Mari tampilkan politik yang mampu melahirkan output berintegritas”, harapnya.

Sebelum mengakhiri pidatonya Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa seminar-seminar seperti ini bagus untuk diadakan dan meminta para mahasiswa

serta juga melibatkan para pelajar yang SMA/SMK, dan kalau perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan menyusun program kedepan, agar tidak terkesan dadakan, dirinya juga mengharapkan kepada Para Mahasiswa untuk terus berkiprah, dan menjadi bagian untuk melahirkan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan mencerdaskan.

“ini yang harus menjadi tekad dari Para Mahasiswa. Saya minta untuk memahami dan mengikuti, perpolitikan ini supaya kita melahirkan pemimpin - pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan daerah ini. Untuk itulah Saya membuat Laboratorium Pemerintahan Daerah. Hal ini agar para Mahasiswa, Pelajar lebih memahami tentang bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan, seperti membuat APBD, Membuat Perda, dan lain sebagainya, supaya ketika mengkritik Pemerintah memiliki dasar yang jelas”, pungkasnya.

Payakumbuh Bicara Pemilu 2024 di RRI Bukittinggi

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Payakumbuh Nofal Ardi menjadi narasumber Program “Geliat Pesta Demokrasi; Bicara Pemilu 2024” di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Bukittinggi, Jumat (9 Juni 2023) pukul 10.00

- 11.00 WIB. Tema yang dibahas adalah: “Pengajuan dan Verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Pemilu 2024”.

Nofal menjelaskan, sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023. Setelah itu, pada tanggal 15 Mei 2023 sampai 23 Juni 2023, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

“Proses verifikasi administrasi dokumen bakal calon ini sedang berlangsung, sedang kami laksanakan dengan memperhatikan meneliti seluruh persyaratan yang telah diajukan oleh partai politik. Kenapa partai politik? Karena peserta Pemilu itu diatur oleh Undang-Undang adalah partai politik. Nah, partai politik lah yang mengajukan bakal calonnya untuk ikutsertakan sebagai kandidat atau calon anggota DPRD Kota Payakumbuh”, ujar Nofal.

Untuk Kota Payakumbuh, partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 18 (delapan belas) partai politik. Sama halnya dengan partai politik peserta Pemilu secara nasional. Namun yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Payakumbuh sebanyak 15 (lima belas) partai politik. ●





ANAS SUDAH KEMBALI, LANGSUNG PASANG TARGET TINGGI

Jadi Ketum PKN 2023-2028

Anas Urbaningrum resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) periode 2023-2028 dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PKN yang digelar di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

I Gede Pasek Suardika, selaku Ketua Umum PKN sebelumnya, kemudian menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) kepada Anas Urbaningrum. Selanjutnya, Anas memberi pidato perdananya sebagai Ketua Umum PKN.

"Malam hari ini, saya diberi amanah untuk memimpin langsung PKN, sungguh itu tugas besar yang sangat berat. Ini adalah situasi yang buat saya pribadi sangat khusus," kata Anas dalam pidatonya.

Anas mengatakan bahwa dirinya yakin bisa

memimpin PKN dengan baik jika seluruh kader partai bersungguh-sungguh, kompak, solid, utuh, dan bersatu dalam melaksanakan tugas-tugas politiknya.

"Karena itu, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa partai ini harus dipanggil, dipukul, ditinggikan bersama-sama oleh seluruh garda kekuatan organisasi kita," ucap dia.

Anas berterima kasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya. Ia pun menegaskan bahwa semua kader memiliki tugas masing-masing di bawah cita-cita kolektif PKN.

"Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang boleh lebih tinggi dari cita-cita kolektif kita," ujar Anas.

Ia mengajak kader PKN untuk menjadikan momentum ini sebagai permulaan yang baik, terlepas dari tantangan dan kesulitan yang dinilainya tidak mudah untuk sebuah partai baru.

"Marilah peristiwa hari ini menjadi permulaan yang baik, permulaan yang indah, meskipun penuh tantangan, meskipun ada situasi yang tidak mudah bagi kita," ucap Anas.

Menurut Anas, PKN bisa melewati tantangan dan kesulitan yang ada dengan optimisme kolektif seluruh kader. Ia menyebut tantangan tersebut adalah hal yang biasa dan harus dijalani.

"Saya boleh punya kesimpulan bahwa

optimisme kolektif kita inilah yang akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Yang bisa mengatasi tantangan besar dan berat itu," ujarnya.

Anas mengaku optimistis partainya bisa "pecah telur" meloloskan calon anggota legislatif (caleg) PKN ke Senayan pada edisi perdananya mengikuti pemilu.

Anas mengaku target tersebut merupakan hal yang berat bagi pihaknya. Akan tetapi, ia yakin target tersebut bisa dicapai oleh PKN dengan strategi yang tepat dan benar.

"Itu angka yang berat, saya harus katakan itu angka yang berat, tetapi angka yang berat itu bukan berarti tidak bisa dipukul tidak bisa diangkat, tidak bisa untuk



Malam hari ini, saya diberi amanah untuk memimpin langsung PKN, sungguh itu tugas besar yang sangat berat.

dicapai, angka itu angka yang dengan strategi yang tepat dan benar, insya Allah kami yakin bisa tembus," ucapnya.

Ia menyebut PKN akan mempersiapkan strategi politik dan caleg dengan matang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menurutnya, dengan cara itu PKN akan menghasilkan anggota parlemen di semua level.

"Dengan caleg-caleg yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas dan strategi kemenangan yang baik, kami yakin akan menghasilkan anggota anggota parlemen di semua level," ucap dia.

Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa kader PKN memiliki optimisme kolektif. Ia menyebut optimisme tersebut menjadi kekuatan partai untuk mencetak sejarah pada Pemilu 2024.

"PKN tahun depan, pasca-pemungutan suara, insya Allah, 14 Februari 2024, akan tercatat dalam sejarah republik ini bahwa partai yang paling baru, yang paling muda usianya, tetapi punya prestasi yang tidak kalah dengan partai-partai yang lebih senior," katanya. ●